



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024



Jalan Adi Sucipto No. 2 A Putussibau Kode Pos 78715 Telp/Fax: (0567) 21205,

WA: 081280366798, Website: disnakertrans.kapuashulukab.go.id,

E-mail: disnakerintranskabh@gmail.com



**KAPUAS HULU
HEBAT!**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahNya, penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2024 ini adalah Perencanaan Program dan Kegiatan yang akan kami lakukan pada Periode 1 Tahun dan merupakan hasil Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan priode sebelumnya sebagai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah.

Putussibau Oktober 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



ELISABET ROSLIN, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671105 199003 2 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar I

Daftar Isi..... II

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Lalar Belakang 1

 1.2 Landasan Hukum 2

 1.3 Maksud dan Tujuan 5

 1.4 Sistematika Penulisan 6

Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu 7

 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana
 Starategis 7

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 7

 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 8

 2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD 13

 2.5 Penelahaan Usulan Program, Kegiatan Masyarakat..... 14

Bab III Tujuan dan Sasaran 15

 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 15

 3.2 Tujuan dan Sasaran 16

 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 Dan
 Prakiraan Maju Tahun 2025 17

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan 18

Bab V Penutup 19

Lampiran 20

Lampiran Tabel Rencana Kerja Tahun 2024

Tabel T-C 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022
Tabel T-C 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022
Tabel T-C 2.3	Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tabel T-C 2.4	Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi
Tabel T-C 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel T-C 3.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Rencana Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel T-C 4.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana Kerja OPD) adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan atau Menjabarkan Perencanaan strategis lima tahun kedalam Perencanaan tahunan yang sifatnya lebih Operasional Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Rencana Kerja OPD) adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong Partisipasi Masyarakat. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan atau Menjabarkan Perencanaan strategis lima tahun kedalam Perencanaan tahunan yang sifatnya lebih Operasional.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Periode 2021-2026.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu ini antara lain adalah :

1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;



17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 -2026;
24. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 58 Tahun 2016 kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas tenaga kerja, perindustrian, dan transmigrasi;
25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustriandan Transmigrasi untuk kurun waktu 1 (Satu) Tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja sebagai penjabaran dari Renstra OPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi. Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yaitu :

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 1 Tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Kabupaten Kapuas Hulu;
- 2) Mewujudkan perencanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustriandan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang sinergis, terpadu dan konsisten serta berkesinambungan dengan pembangunan daerah;
- 3) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja;
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi tahunan dalam kurun waktu 1 tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I	PENDAHULUAN	Berisi tentang latar belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD, serta sistematika penulisan;
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI TAHUN LALU	Berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	Berisi tentang Program beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan.
BAB V	PENUTUP	

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN LALU DAN
CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Kajian (review) terhadap evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Tabel T-C. 2.1

*Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dan
Pencapaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2022 **Dapat dilihat di**
halaman Belakang Rencana Kerja;*

2.2 ANALIS KINERJA PELAYANAN

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026.

Tabel T-C. 2.2

*Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja,
Perindustrian dan Transmigrasi Tahun **Dapat dilihat di halaman**
Belakang Rencana Kerja;*



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi dengan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

- 1) Angka pengangguran masih cukup tinggi yang disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja, keahlian tenaga kerja yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, dan kualitas tenaga kerja relatif masih rendah. Informasi peluang kerja dan mekanisme penempatan tenaga kerja belum sepenuhnya dipahami masyarakat;
- 2) Dukungan personel yang kurang memadai dalam hal jumlah terutama personel yang berkaitan dengan pendataan tenaga Kerja;
- 3) Rendahnya kualitas calon TPA dan TPS yang ditempatkan di lokasi transmigrasi serta Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik (jejaring atau kerjasama, kejuruan unggulan);
- 4) Masih lemahnya kelembagaan hubungan industrial serta pembinaan dan sosialisasi dari mediator hubungan Industrial untuk program jamsostek Tenaga Kerja Luar Hubungan kerja masih kurang;
- 5) Masih banyaknya jumlah perselisihan hubungan industrial (Perselisihan Hak dan Kepentingan) serta kurang harmonisnya hubungan industrial yang dapat mengganggu produktivitas kerja, kesejahteraan pekerja, ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha. Masih banyaknya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam Jamsostek (sekarang BPJS – Ketenagakerjaan);
- 6) Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja serta kualitas daya saing calon tenaga kerja belum sesuai dengan kebutuhan pasar;
- 7) Sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja belum sesuai dengan perkembangan kebutuhan pasar kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan belum memadai serta Perlindungan Tenaga Kerja belum optimal;
- 8) Besarnya potensi komoditi unggulan, potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang belum dikembangkan secara optimal. Minimnya diversifikasi serta rendahnya kualitas dan daya saing mayoritas produk industri kecil serta minimnya pemanfaatan teknologi bagi pengembangan usaha industri kecil dan menengah;
- 9) Belum optimalnya fasilitasi yang diberikan kepada industri kecil baik fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran maupun pendampingan serta belum optimalnya pengembangan industri berbasis sentra dan kluster;
- 10) Minimnya perlindungan HKI dan standardisasi produk industri serta disparitas dan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi;
- 11) Adanya era perdagangan bebas yang membuka pintu masuk produk-produk import sehingga menambah ketatnya persaingan produk-produk perindustrian; dan

- 12) Jumlah sumber daya aparatur pembina industri yang sangat minim sehingga berpotensi tidak mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut, maka strategi yang diperlukan adalah :

- 1) Meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan mendorong tumbuh dan berkembangnya wirausaha baru;
- 2) Perlunya perbaikan sistem hubungan industrial perusahaan yang harmonis;
- 3) Pembinaan lembaga pelatihan kerja berbasis kompetensi (SKKNI) dan penguatan sarana prasarana penyelenggara pelatihan kerja sesuai dengan perkembangan pasar kerja Penyediaan informasi ketenaga kerjaan berbasis IT;
- 4) Perbaikan syarat-syarat kerja (PP, PK, dan PKB) dan sistem pengupahan sesuai perundang-undangan;
- 5) Mendorong pembentukan dan berfungsinya LKSB serta Serikat Pekerja; dan
- 6) Perlunya Pelayanan Wajib lapor ketenaga kerjaan perusahaan berbasis IT.

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu - isu strategis pelayanan Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu – isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor – factor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1) VISI

Visi merupakan pernyataan cita - cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita - citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha - usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (level of living) masyarakat. Berikut visi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam RPJMD 2021-2026.



***“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK,
BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”***

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Hulu selanjutnya dilaksanakan pada periode pembangunan 2021-2026. Sebagai upaya dalam memberikan arah dan fokus pembangunan secara berkelanjutan, dibutuhkan suatu proses perumusan kebijakan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya seefektif dan seefisien mungkin melalui sebuah perencanaan pembangunan.

Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

- 1) **Harmonis** : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;Energik : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- 2) **Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
- 3) **Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 4) **Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi

2) MISI

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus Batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;
- 2) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
- 3) Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan yang memiliki daya saing;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;
- 5) Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan Kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dari 5 misi Kabupaten Kapuas Hulu yang tercantum pada RPJMD maka Dinas Tenaga Kerja, Industri dan Transmigrasi mendukung misi ke 2, 3 dan misi ke 4.

Misi kedua, Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi Potensi ekonomi di Kapuas Hulu adalah sektor pertanian beserta turunannya seperti pertanian pangan, perkebunan serta perikanan. Sektor perekonomian lain yang dikembangkan adalah sektor perindustrian terutama sektor industri hulu-hilir guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat. Usaha kecil dan menengah memegang peranan signifikan dalam perekonomian Kapuas Hulu, Adanya wabah pandemi Covid-19 berdampak ke berbagai sektor ekonomi, termasuk di sektor usaha mikro sehingga diperlukan upaya pemerintah daerah dalam membantu UMKM.

Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah dengan menyiapkan sarana dan prasarana pelatihan sebagai basis ekonomi kerakyatan.
- b) Meningkatkan kualitas dan kuantitas industri kecil dan menengah sehingga dapat diterima pasar nasional dan internasional
- c) Membangun tata kelola niaga hasil industri kecil dan menengah menuju pasar ekspor.
- d) Penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).



- e) Menyiapkan tenaga kerja yang bersertifikasi dan terampil, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.
- f) Meningkatkan inovasi teknologi tepat guna terhadap proses produksi dan menumbuhkan-kembangkan dunia usaha kecil dan menengah.
- g) Menyediakan aksesibilitas dan pengembangan lembaga keuangan untuk pengembangan dunia usaha yang produktif
- h) Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan parasarana, serta pemasaran untuk mendukung kegiatan pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan.
- i) Mengembangkan kawasan agropolitan, pariwisata dan perikanan.
- j) Mendorong dan meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
- k) Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca COVID-19.

Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi juga mendukung misi ke 3 dan 4 yaitu :

Misi Ketiga, Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, Mandiri, Cerdas dan Inovatif dalam Meningkatkan Kualitas dan Mutu Pendidikan yang memiliki daya saing, untuk mewujudkan satuan permukiman yang mandiri, cerdas dan inovatif dalam pengembangan Kawasan transmigrasi, Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a) Meningkatnya Pendapatan Warga Transmigrasi dalam tahap kemandirian, melalui pelatihan, bantuan stimulan serta penguatan Infrastruktur Penunjang keberhasilan Ekonomi Satuan Permukiman.

Misi keempat, Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi responsibilitas dan akuntabilitas Tata kelola pemerintahan berkaitan dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) serta sumber daya aparatur. dengan memperbaiki tata kelola pemerintahan Kapuas Hulu diharapkan dapat menciptakan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi dan memegang nilai-nilai teguh dasar serta memiliki daya saing dengan kabupaten lain di Indonesia.

Kabupaten Kapuas Hulu yang sebagian merupakan daerah konservasi yang dilindungi sehingga dalam melaksanakan pembangunan perlu memerhatikan aspek lingkungan. Pembangunan infrastruktur di bidang transportasi, pengairan dan irigasi, telekomunikasi diarahkan pada penyediaan layanan pengangkutan barang dan jasa baik melalui darat sungai dan penyeberangan secara lebih cepat, mudah, murah dan terpadu; penyediaan sumberair bersih dan sehat; penguatan jaringan layanan pemasaran untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan dan penguatan keunggulan komparatif Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam mewujudkan misi tersebut program kerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu antara lain:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan potensi aparatur Pemerintah yang profesional.
- b) Pembakuan nama rupabumi, di antaranya mengembalikan nama wilayah administrasi pemerintahan dan unsur-unsur geografi yang tidak sesuai kearifan lokal.
- c) Meningkatkan pengembangan inovasi aparatur Pemerintah terkait reformasi birokrasi berbasis teknologi.
- d) Mendorong transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- e) Meningkatkan informasi pelayanan publik yang terukur untuk penerapan e- government Mendukung pemberian penghargaan terhadap Aparatur Pemerintah yang berprestasi Meningkatkan koneksitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
- f) Meningkatkan infrastruktur pelayanan sosial dasar, listrik, komunikasi dan telekomunikasi.
- g) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana dan pengelolaan sampah.

2.4 RIVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD

Dalam penyusunan RENJA ini tidak terlepas dari dokumen RKPD yang telah diusulkan sebelumnya, Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Renja Tahun 2024 ini seluruhnya telah sesuai serta mengikuti program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah diusulkan dalam dokumen RKPD sebelumnya. Semua kebutuhan untuk pelaksanaan Renja Tahun 2024 telah ditampung semuanya dalam RKPD, Oleh karena itu, tidak dijelaskan lebih dalam mengenai perubahan rancangan program dan kegiatan dan sub kegiatan baik penambahan maupun penghapusan.

Tabel T-C. 2.3

Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi, **Dapat dilihat di halaman Belakang Renja;**

2.5 PENALAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi akan menambah usulan program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023. Usulan-Usulan dan Kegiatan Masyarakat yang langsung ditujukan kepada SKPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD/OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan. Sehingga Usulan-usulan program masyarakat akan langsung diteruskan ke masing-masing SKPD yang terkait dan akan di temukan di dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan yang akan melibatkan seluruh Stakeholder Pemerintahan dalam menentukan program-program prioritas pembangunan kedepannya.

Tabel T-C. 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi **Dapat dilihat di
halaman Belakang Renja;**



BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam undang-undang tersebut terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu:

- 1) Untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- 4) Optimalisasi partisipasi masyarakat; dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pembangunan yang bersinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, maka perlu penyelarasan Arah kebijakan antara Kementerian/Lembaga terkait dengan Pemerintah Kabupaten khususnya berkaitan dengan Bidang Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Melalui Rencana Strategis Provinsi Kalimantan Barat telah dijabarkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang mana salah satunya sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi yaitu penyelarasan dengan arah kebijakan nasional.

Tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah memastikan bahwa arah kebijakan dan strategi pembangunan pada Kementerian/Lembaga terkait berjalan dengan baik dan saling mendukung guna keselarasan pembangunan dari Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor - faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistis.

Adapun tujuan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan;
- 2) Meningkatkan Kesempatan Kerja;
- 3) Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Warga Transmigrasi; dan
- 4) Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai orientasi pada hasil dan dapat dicapai pada periode tertentu. sasaran Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Selama 5 (Lima) tahun periode 2021 - 2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran, indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

- Tujuan Pertama** : Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan, dengan Sasaran :
- 1. Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan, dengan indikator Sasaran :
 - Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan
- Tujuan Kedua** : Meningkatkan Kesempatan Kerja, dengan Sasaran :
- 1. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja, dengan Indikator Sasaran :
 - Persentase Tenaga Kerja Produktif

- Tujuan Ketiga** : Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Warga Transmigrasi, dengan Sasaran :
1. Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi, dengan Indikator Sasaran :
 - Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri
- Tujuan Keempat** : Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah, dengan sasaran :
1. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan Indikator Sasaran :
 - Nilai Reformasi Birokrasi
 - Predikat Sakip Perangkat Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan Indikator Sasaran :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Tabel T-C. 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu
Dapat dilihat di halaman Belakang Renja;

3.3 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan Rencanakan dan diperlukan pembiayaan pada Tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Adapun rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2023 serta prakiraan maju Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel T-C. 3.2

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024 dan Prakiraan Tahun 2025 Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu **Dapat dilihat di halaman Belakang Renja;**

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Hulu Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program, dan kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024.

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan pelayanan yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya bisa dirasakan hingga ke level terbawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Renja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah program tahunan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang sesuai dengan tupoksi dan sasaran program Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Hulu.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Hulu ini disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan rencana kerja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Hulu, sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu.

Tabel T-C. 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan
Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2024 **dapat dilihat di Halaman Belakang Renja;**

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan jangka Pendek atau Tahunan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam pengembangan perencanaan, koordinasi dan pengendalian pembangunan selama 1 (Satu) tahun, memberikan arah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu.

Dengan demikian penjabaran Renstra ke dalam Renja OPD atau dokumen-dokumen perencanaan lain dapat bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan RKPD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan.

Dengan demikian diharapkan kinerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu akan dapat semakin meningkat dan pada akhirnya diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengatasi masalah di bidang Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Ketransmigrasian.

Putussibau Oktober 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA,
PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



ELISABET ROSLIN, S.H.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19671105 199003 2 010



LAMPIRAN

TABEL (T-C. 2.1)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DAN PENCAPAIAN RENSTRA
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I		II		III		IV																
(1)				(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.496.645.330		5.666.860.529		1.016.168.552		1.520.214.451		1.612.190.775		1.500.047.120		5.648.620.898	0	11.145.266.228	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						5.496.645.330		5.666.860.529		1.016.168.552		1.520.214.451		1.612.190.775		1.500.047.120		5.648.620.898	0	11.145.266.228	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	01		Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				71,00	5.434.880.129	0,00	879.078.552	0,00	1.472.526.051	70,18	1.607.956.775	0,00	1.457.079.120	70,18	5.416.640.498	70,18	10.237.730.728	0,00	0,00	Disnakerintrans				
				Meningkatnya kualitas administrasi umum perangkat daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%			95,00			0,00		0,00		0,00	75,66	75,66	75,66		0,00	Disnakerintrans							
2	07	01	2.01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselenggarakan	Dokumen		68.768.100	21	93.693.300	10	16.152.600	2	13.305.500	1	20.963.900	8	43.271.300	21	93.693.300	21	162.461.400	0,00	0,00	Disnakerintrans				
2	07	01	2.01	01	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		27.626.600	11	13.513.200	5	2.750.000	1	3.365.000	0	7.283.200	5	115.000	11	13.513.200	11	41.139.800	0,00	0,00	Disnakerintrans				
2	07	01	2.01	02	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		13.658.000	1	4.358.000	0	- 0	- 0	- 0	1	4.358.000	1	4.358.000	1	18.016.000	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	01	2.01	03	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		4.798.700	1	4.358.000	1	4.358.000	0	- 0	- 0	1	4.358.000	1	9.156.700	0,00	0,00	Disnakerintrans						
2	07	01	2.01	04	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		9.358.000	1	4.358.000	1	- 0	4.358.000	0	- 0	- 0	1	4.358.000	1	13.716.000	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	01	2.01	05	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		6.781.000	1	4.364.800	1	- 0	- 0	- 0	4.364.800	1	4.364.800	1	11.145.800	0,00	0,00	Disnakerintrans						
2	07	01	2.01	06	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		6.545.800	1	4.609.600	1	4.609.600	0	- 0	- 0	- 0	1	4.609.600	1	11.155.400	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	01	2.01	07	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		- 5	58.131.700	1	4.435.000	1	5.582.500	1	13.680.700	2	34.433.500	5	58.131.700	5	58.131.700	0,00	0,00	Disnakerintrans				
2	07	01	2.02		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselenggarakan	Laporan		3.136.261.913	12	3.510.496.829	3	493.815.743	3	1.151.234.792	3	1.036.296.640	3	813.039.362	12	3.494.386.537	12	6.630.648.450	0,00	0,00	Disnakerintrans				

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV											
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 07 01 2.02 01	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan			2.842.778.313	452	3.255.153.229	98	491.673.343	128	1.091.842.392	130	936.831.240	96	718.695.962	452	3.239.042.937	452	6.081.821.250	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 02	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen			-	12	2.500.000	3	-	3	-	3	2.500.000	3	-	12	2.500.000	12	2.500.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 03	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /erifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen			271.840.000	1	232.540.000	1	-	0	57.510.000	0	95.850.000	0	79.180.000	1	232.540.000	1	504.380.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 04	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 05	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan			11.369.600	1	8.369.600	0	-	0	-	0	-	1	8.369.600	1	8.369.600	1	19.739.200	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 06	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen			1.840.000	17	1.500.000	0	-	0	-	0	-	17	1.500.000	17	1.500.000	17	3.340.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 07	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan			8.434.000	18	8.434.000	4	2.142.400	5	1.882.400	4	1.115.400	5	3.293.800	18	8.434.000	18	16.868.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.02 08	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen			-	1	2.000.000	0	-	0	-	0	-	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.03	Tersusunnya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.03 01	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.03 02	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.03 03	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 01 2.03 04	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV												
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)	
2	07	01	2.03	05		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lapora n		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokum en		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lapora n		8.534.000		12		11.103.600	3	4.975.600	3	2.245.000	3	3.883.000	3	- 12		11.103.600	12	19.637.600	0,00	0,00	Disnakerintrans
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		- 2		1.700.000		0		- 0		- 2		1.700.000	0	- 2		1.700.000	2	1.700.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokum en		8.534.000		6		6.534.000	2	2.106.000	2	2.245.000	2	2.183.000	0	- 6		6.534.000	6	15.068.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokum en		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokum en		- 1		2.869.600		0		2.869.600	0	- 0		- 1		- 1		2.869.600	1	2.869.600	0,00	0,00	Disnakerintrans
				Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Orang		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Orang		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		- 0		0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		0,00	0,00	Disnakerintrans	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lapora n		762.269.300		12		803.488.200	3	159.477.800	3	107.673.100	3	254.077.600	3	- 12		803.415.900	12	1.565.685.200	0,00	0,00	Disnakerintrans
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket		23.999.000		7		20.022.600	2	3.767.000	2	3.398.000	2	4.784.600	1	- 7		20.022.600	7	44.021.600	0,00	0,00	Disnakerintrans

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
								I		II		III		IV				(12) = (8+9+10+11)	(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				K		Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	07	01	2.06	02	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		156.795.500	1	139.677.600	0	-	0	-	1	92.907.000	0	46.698.300	1	139.605.300	1	296.400.800	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	03	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		23.629.000	4	20.629.000	1	6.212.500	1	5.008.500	1	3.215.000	1	6.193.000	4	20.629.000	4	44.258.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	05	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		39.536.000	1	35.065.600	1	11.096.000	0	8.290.500	0	6.633.500	0	9.045.600	1	35.065.600	1	74.601.600	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	06	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	07	Tersedianya Bahan/Material	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	08	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	09	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		518.309.800	343	588.093.400	93	138.402.300	83	90.976.100	81	146.537.500	86	212.177.500	343	588.093.400	343	1.106.403.200	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	10	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.06	11	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	Laporan		-	1	39.540.000	0	-	0	-	1	39.540.000	0	-	1	39.540.000	1	39.540.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	01	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		-	2	39.540.000	0	-	0	-	2	39.540.000	0	-	2	39.540.000	2	39.540.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	02	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	05	Tersedianya Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	06	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	07	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	08	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.07	09	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV														
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
2	07	01	2.07	10	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	01	2.07	11	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	01	2.08		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselenggarakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselenggarakan	Laporan			641.569.717	12	755.428.400	3	163.600.509	3	172.728.559	3	190.968.635	3	226.153.758	12	753.451.461	12	1.395.021.178	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.08	01	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan			4.500.000	2	2.500.000	0	-	1	750.000	0	-	1	1.750.000	2	2.500.000	2	7.000.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.08	02	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan			58.842.717	4	69.800.400	1	25.132.509	1	7.503.559	1	19.870.635	1	16.996.118	4	69.502.821	4	128.345.538	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.08	03	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2	07	01	2.08	04	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan			578.227.000	1	683.128.000	1	138.468.000	0	164.475.000	0	171.098.000	0	207.407.640	1	681.448.640	1	1.259.675.640	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.09		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselalkan	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselalkan	Laporan			203.687.200	12	221.129.800	3	41.056.300	3	25.339.100	3	62.227.000	3	92.427.300	12	221.049.700	12	424.736.900	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.09	01	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			151.372.500	3	182.337.800	1	29.550.000	1	14.028.000	1	58.807.000	0	79.952.800	3	182.337.800	3	333.710.300	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.09	02	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit			13.321.700	31	13.600.000	8	3.214.300	8	4.321.100	9	-	6	5.984.500	31	13.519.900	31	26.841.600	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.09	06	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit			27.378.000	3	25.192.000	1	8.292.000	1	6.990.000	1	3.420.000	0	6.490.000	3	25.192.000	3	52.570.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	01	2.09	08	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2	07	01	2.09	09	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit			-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
2	07	01	2.09	10	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		11.615.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	11.615.000	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	01	2.09	11	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	01	2.09	12	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	02			Tersedianya Dokumen PERENCANAAN TENAGA KERJA	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA /UNIVERSITAS	Persentase		37.551.400	13.000.000	7.860.000	5.140.000	-	-	0	13.000.000	0	50.551.400	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	02	2.01		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen		37.551.400	13.000.000	7.860.000	5.140.000	-	-	0	13.000.000	0	50.551.400	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	02	2.01	01	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen		-	1	13.000.000	1	7.860.000	0	5.140.000	0	-	0	-	1	13.000.000	1	13.000.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	02	2.01	02	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan		37.551.400	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	37.551.400	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	03			Meningkatnya/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	Persentase		440.856.800	159.436.300	111.731.400	25.505.900	800.000	21.399.000	0	159.436.300	0	600.293.100	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	03	2.01		Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Klaster Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jenis		409.341.800	149.158.800	111.731.400	16.028.400	-	21.399.000	0	149.158.800	0	558.500.600	0,00	0,00	Disnakerintrans					
2	07	03	2.01	01	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		347.931.800	8	101.979.600	8	93.579.600	0	8.400.000	0	-	0	-	8	101.979.600	8	449.911.400	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	03	2.01	02	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga		61.410.000	1	47.179.200	1	18.151.800	0	7.628.400	0	-	0	21.399.000	1	47.179.200	1	108.589.200	0,00	0,00	Disnakerintrans
2	07	03	2.01	03	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans		
2	07	03	2.02		Telaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	Lembaga		31.515.000	10.277.500	-	9.477.500	800.000	-	0	10.277.500	0	41.792.500	0,00	0,00	Disnakerintrans					

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
2 07 03 2.02 01	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lemba ga		31.515.000	4	10.277.500	0	-	3	9.477.500	1	800.000	0	-	4	10.277.500	4	41.792.500	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.03	Tersedianya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Terdaftar	Perizin an		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.03 01	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizin an		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.04	Tersusunnya Dokumen Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Dokumen Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dokum en		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.04 01	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusa haan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.05	Telaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengukuran Produktivitas Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja Purna Pelatihan yang mandiri	Orang		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 03 2.05 01	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokum en		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04	Meningkatnya Penempatan Tenaga Kerja yang terlatih	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	Persen tase		14.233.000		4.497.900		4.497.900		-		-		-	0	4.497.900	0	18.730.900	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01	Tersusunnya Laporan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	Lapora n		14.233.000		4.497.900		4.497.900		-		-		-	0	4.497.900	0	18.730.900	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01 01	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain- lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01 02	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang		14.233.000	146	4.497.900	30	4.497.900	35	-	34	-	47	-	146	4.497.900	146	18.730.900	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01 03	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01 04	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	
2 07 04 2.01 05	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans	

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)	(13) = (6 + 12)	(14) =(13/5	(15)		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
2 07 04 2.02	Tersedianya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LPTKS yang Terdaftar	Lemba ga		-		-		-		-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.02 01	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lemba ga		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.02 02	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lemba ga		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.03	Tersedianya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja Online yang dipublikasikan	Informa si		-		-		-		-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.03 01	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokum en		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.03 02	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.03 03	Terlaksananya Job Fair /Bursa Kerja	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.04	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang		-		-		-		-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.04 01	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.04 02	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.04 03	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 04 2.05	Tersusunnya Dokumen Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	Dokum en		-		-		-		-		-		-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								I		II		III		IV									
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5		(15)	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp
2 07 04 2.05 01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SK TIM penyusunan Perda	Dokumen					0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05	Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%		182.913.900		55.046.200		13.000.700		17.042.500		3.434.000		21.569.000	0	55.046.200	0	237.960.100	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.01	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PP dan PKB yang Terdaftar	PP dan PKB		90.147.900		8.000.000		-		5.986.500		1.818.500		195.000	0	8.000.000	0	98.147.900	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.01 01	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.01 02	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan		-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.01 03	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan		90.147.900	12	8.000.000	3	-	3	5.986.500	3	1.818.500	3	195.000	12	8.000.000	12	98.147.900	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.02	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perusahaan		92.766.000		47.046.200		13.000.700		11.056.000		1.615.500		21.374.000	0	47.046.200	0	139.812.200	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.02 01	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara		92.766.000	3	20.589.000	1	11.440.000	1	-	0	-	1	9.149.000	3	20.589.000	3	113.355.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
2 07 05 2.02 02	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan	Perkara		-	3	24.000.000	0	-	1	10.228.500	1	1.546.500	0	12.225.000	2	24.000.000	2	24.000.000	0,00	0,00	Disnakerintrans

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
								I		II		III		IV										
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(11)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	(15)
2	07	05	2.02	03	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja																

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab											
								I		II		III		IV																
(1)				(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3 31 03		Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Jumlah IKM yang memiliki NIB	IKM			-		-			-		-			0		-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans		
3 31 03 2.01		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Izin yang direkomendasi	Izin			-		-			-		-			0		-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans		
3 31 03 2.01 01		Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINAS yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen			-	0	-	0		-	0		-	0	-	0	-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans		
3 31 03 2.01 02		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			-	0	-	0		-	0		-	0	-	0	-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans		
3 31 04		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Pertumbuhan Data IKM	%			-		-			-		-			-	0		-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans	
3 31 04 2.01		Tersedianya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen			-		-			-		-			-	0		-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans	
3 31 04 2.01 01		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen			-	0	-	0		-	0		-	0	-	0	-	0		-	0,00	0,00			Disnakerintrans		

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
								I		II		III		IV														
								(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12) = (8+9+10+11)	(13) = (6 + 12)	(14) =(13/5)	(15)		
(1)	(2)	(3)	(4)		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
3	31	04	2.01	02	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Diseminasi Publikasi data informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokum en																	Disnakerintrans			
							-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00				
3	31	04	2.01	03	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan kawasan Industri lingkup kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokum en																	Disnakerintrans			
							-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00				
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																				Disnakerintrans			
											445.870.200		424.805.700		161.802.200		146.343.400		31.479.000		85.181.100	0	424.805.700	0	870.675.900	0,00	0,00	Disnakerintrans
3	32	02			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Dokum en																	Disnakerintrans			
							129.623.000		-		-		-		-		-		-	0		-	0	129.623.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
3	32	02	2.01		Tersusunnya Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Dokum en																	Disnakerintrans			
							129.623.000		-		-		-		-		-		-	0		-	0	129.623.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
3	32	02	2.01	01	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokum en																	Disnakerintrans			
							-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00				
3	32	02	2.01	02	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawas an Transm igrasi																	Disnakerintrans			
							102.747.000	0		-	0		0		-	0		-	0		-	0	102.747.000	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	02	2.01	03	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar																	Disnakerintrans			
							-	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0,00	0,00				
3	32	02	2.01	04	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokum en																	Disnakerintrans			
							26.876.000	0		-	0		-	0		-	0		-	0		-	0	26.876.000	0,00	0,00	Disnakerintrans	
3	32	03			Tersedianya Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	Kawas an Transm igrasi																	Disnakerintrans			
							89.487.400		143.129.200		31.218.000		72.607.200		5.437.800		33.866.200	0	143.129.200	0	232.616.600	0,00	0,00					
3	32	03	2.01		Terlaksananya Penataan Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Dokum en																	Disnakerintrans			
							89.487.400		143.129.200		31.218.000		72.607.200		5.437.800		33.866.200	0	143.129.200	0	232.616.600	0,00	0,00					
3	32	03	2.01	01	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Lapora n																	Disnakerintrans			
							89.487.400	18	143.129.200	5	31.218.000	7	72.607.200	3	5.437.800	3	33.866.200	18	143.129.200	18	232.616.600	0,00	0,00					

Kode	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan / Sub kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2021)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2022) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022(%)	Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								I		II		III		IV													
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12) = (8+9+10+11)		(13) = (6 + 12)		(14) =(13/5)		(15)		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3	32	03	2.01	02	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	03	2.01	03	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluar ga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	03	2.01	04	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluar ga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	03	2.01	05	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluar ga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	03	2.01	06	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	03	2.01	07	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluar ga	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	0,00	Disnakerintrans		
3	32	04			Tersedianya Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	%		226.759.800		281.676.500		130.584.200		73.736.200		26.041.200		51.314.900	0	281.676.500	0	508.436.300	0,00	0,00	Disnakerintrans
3	32	04	2.01		Tersedianya Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian	Satuan Permu kiman		226.759.800		281.676.500		130.584.200		73.736.200		26.041.200		51.314.900	0	281.676.500	0	508.436.300	0,00	0,00	Disnakerintrans
3	32	04	2.01	01	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluar ga		100.259.800	30	90.022.200	30	74.412.200	0	15.610.000	0	-	0	-	30	90.022.200	30	190.282.000	0,00	0,00	Disnakerintrans
3	32	04	2.01	02	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permu kiman		126.500.000	4	191.654.300	1	56.172.000	1	58.126.200	1	26.041.200	1	51.314.900	4	191.654.300	4	318.154.300	0,00	0,00	Disnakerintrans
JUMLAH								8.885.632.069		6.934.033.029		1.247.551.552		1.784.130.101		1.850.297.125		2.032.211.271		6.914.190.049		15.799.822.118		0,00	Disnakerintrans		

TABEL (T-C. 2.2)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Indikator	Satuan	Target capaian setiap tahun						Realisasi capaian setiap tahun		Persentase capaian setiap tahun %	
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persen	4,59	4,69	4,78	4,87	4,97	5,07	4,59	4,26	100,00	90,83
2	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	Persen	25,00	9,25	13,4	17,60	19,90	20,80	25,00	2,31	100,00	24,97
3	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	Persen	9,11	10,42	13,02	15,63	18,23	20,83	9,11	14,81	100,00	142,13
4	Nilai Reformasi Birokrasi perangkat Daerah	Nilai	-	25,10	26,10	27,10	28,10	29,10	-	18,47	0,00	73,59
5	Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predika t	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	100,00	100,00
6	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	Score	97,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00	97,00	95,00	100,00	100,00

TABEL (T-C. 2.3)
RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode		Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting															
		Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif																
(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)			
2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						12.739.675.789						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.007.122.260						-	
2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						12.739.675.789						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						6.007.122.260						-	
2	07	01			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,00	9.967.007.489	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61.00	5.508.574.760	-												
				Indeks Kepuasan Pelayanan Internal			%	96,00	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal				%	96.00															
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Dokumen	21	301.587.636	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Dokumen	24	90.567.200	-												
2	07	01	2.01	01	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	121.000.000	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	33.324.200	-												
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	12.455.498	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	-												
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	12.455.498	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	-												
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	12.455.498	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	-												
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	12.455.498	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	-												
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	12.790.644	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.263.000	-												
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5	117.975.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	23.944.000	-												
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan	Laporan	12	3.861.504.918	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terselesaikan	Laporan	12	3.625.189.090	-												
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	396	3.794.611.326	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	490	3.383.015.390	-												

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	18.150.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.500.000	-
2	07	01	2.02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	3.025.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	213.870.000	-
2	07	01	2.02	04		Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	7.260.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15.132.938	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.369.300	-
2	07	01	2.02	06		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	30	7.260.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	30	1.500.400	-
2	07	01	2.02	07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	18	11.225.654	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	30	13.934.000	-
2	07	01	2.02	08		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	4.840.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.000.000	-
2	07	01	2.03			Adminstrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Dokumen	9	119.790.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	9.680.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	02		Pengamanan Barang Milik Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	7.260.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	03		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	24.200.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	04		Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	42.350.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	05		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	12.100.000	0	0	0	0	0	0	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	2	12.100.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	12.100.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	362.130.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	93.404.000	-
2	07	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit	1	14.520.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	30.250.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	18.500.000	-
2	07	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi dan Kepegawaian	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	3	7.260.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	24.200.000	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	18.500.000	-
2	07	01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang	3	15.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab, Provinsi & Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	24	150.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam Provinsi/Luar Provinsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	56.404.000	-
2	07	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Provinsi & Luar Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	24	60.500.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab, Provinsi & Luar Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	24	48.400.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	1.165.230.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	753.422.800	-
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	7	30.250.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.021.800	-
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	108.900.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	234.313.000	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	30.250.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.229.000	-
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	50.820.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	58.124.000	-
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12.100.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	404	405.735.000	-
2	07	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	66.550.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	24.200.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Provinsi & Luar Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	450	786.500.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	726	27.830.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	16	27.830.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Mliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselasaikan	Laporan	1	1.849.500.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	20	145.200.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	15	36.300.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	605.000.000	0	0	0	0	0	-	
2	07	01	2.07	11	Pengadaan Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	2	363.000.000	0	0	0	0	0	-	
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselenggarakan	Laporan	12	911.950.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselaskan	Laporan	12	709.919.570	-
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.050.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	-
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	139.150.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	90.900.000	-
2	07	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	1	78.650.000	0	0	0	0	0	-	
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	688.100.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	616.519.570	-
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselaskan	Laporan	12	1.395.314.936	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselaskan	Laporan	12	236.072.100	-
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	166.631.218	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	179.893.100	-
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	18.101.600	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	13.500.000	-
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	36.440.118	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	42.679.000	-
2	07	01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit	1	12.000.000	0	0	0	0	0	-	
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	660.000.000	0	0	0	0	0	-	

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	30.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Perasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	387.200.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Kabupaten Kapuas Hulu	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	0,1246	84.942.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kabupaten Kapuas Hulu	Rasio angkatan kerja lulusan SD/SMP/SMA/DIPLOMA/ UNIVERSITAS	Persentase	79,38	46.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Dokumen	1	46.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	Perusahaan	10	46.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	Persentase	100,00	2.190.000.000	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	Persentase	100,00	250.565.400	-
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Klaster Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jenis	2	2.190.000.000	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Klaster Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jenis	2	224.639.400	-
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	40	1.800.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	32	172.355.200	-
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	4	90.000.000	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	52.284.200	-
2	07	03	2.01	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LPKS yang terakreditasi	Lembaga	1	59.870.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LPKS yang terakreditasi	Lembaga	1	25.926.000	-
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	4	59.870.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	4	25.926.000	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LPK yang Terdaftar	Perizinan	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.04		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Dokumen	10	35.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	10	35.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja Purna Pelatihan yang mandiri	Orang	5	147.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	10	147.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	Persentase	63,15	185.500.000	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	Persentase	30.00	188.679.100	-
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	Laporan	12	185.500.000	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	Laporan	12	30.721.500	-
2	07	04	2.01	01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	200	10.500.000	Pelayanan antar Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	40	30.721.500	-
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	46	35.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Orang	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	250	40.000.000	0	0	0	0	0	0	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LPTKS yang Terdaftar	Lembaga	1	48.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga	1	10.500.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	1	37.500.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Informasi Pasar Kerja Online yang dipublikasikan	Informasi	1	89.407.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	1	44.407.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang	200	45.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang	10	72.350.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang	4	157.957.600	-
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	10	42.350.000	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	157.957.600	-
2	07	04	2.04	02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	10	30.000.000	0	0	0	0	0	0	-
2	07	04	2.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perda yang Diterbitkan	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
2	07	04	2.05	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah SK TIM penyusunan Perda	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	-
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100,00	351.168.300	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100,00	59.303.000	-
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah PP dan PKB yang Terdaftar	PP dan PKB	15	351.168.300	0	0	0	0	0	0	-
2	07	05	2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	10	78.167.250	0	0	0	0	0	0	-
2	07	05	2.01	02	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	5	79.931.250	0	0	0	0	0	0	-
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	12	193.069.800	0	0	0	0	0	0	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kepala Seksi Perlindungan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perusahaan	25	220.936.590	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perusahaan	20	59.303.000	-
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	81.364.500	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	35.884.000	-
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	75.075.840	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	23.419.000	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif		
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	3	11.576.250	0	0	0	0	0	-		
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	0	-	0	0	0	0	0	-		
2	07	05	2.02	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kabupaten Kapuas Hulu	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	11,867	52.920.000	0	0	0	0	0	-		
					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN						URUSAN PEMERINTAH PILIHAN						1.082.386.700	-
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						579.790.600	-
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase	5,79	4.937.465.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase	4,00	579.790.600	-	
				Persentase Pertumbuhan Investasi IKM			4,5						Persentase Pertumbuhan Investasi IKM		3,00		-	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	Dokumen	1	4.937.465.000	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	Dokumen	0	579.790.600	-	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
3	31	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kec Badau	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	300.000.000	0	0	0	0	0	0	-	
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	-	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	10	1.431.465.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kecamatan (Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Puring Kencana, Jongkong Selimbau, Semitau, (dalam Provinsi/Luar Provinsi)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	7	579.790.600	-	
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kabupaten, Provinsi dan Luar Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen	10	3.046.000.000	0	0	0	0	0	0	-	

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
3	31	02	2.01	06		Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kec Badau	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	110.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	03				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah IKM yang memiliki NIB	IKM	50	223.100.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	03	2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Izin yang direkomendasi	Izin	50	223.100.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	03	2.01	01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	03	2.01	02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	133.100.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	04				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Kabupaten Kapuas Hulu	Pertumbuhan Data IKM	%	2,00	258.100.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	04	2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	258.100.000	0	0	0	0	0	0	-

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
3	31	04	2.01	01		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	133.100.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	04	2.01	02		Diseminasi Publikasi data informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota melalui (SIINAS)	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen	1	55.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	31	04	2.01	03		Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan kawasan Industri lingkup kabupaten/Kota dalam penyampaian data ke SIINAS	Kabupaten Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	1	70.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					2.438.150.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					502.596.100	-
3	32	02				PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)	Dokumen	1	1.349.150.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	02	2.01			Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi yang ditetapkan	Dokumen	1	1.349.150.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	02	2.01	01		Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	199.650.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	02	2.01	02		Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Kawasan Mentebah	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi	1	363.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	02	2.01	03		Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	2.500	363.000.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	02	2.01	04		Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	423.500.000	0	0	0	0	0	0	-
3	32	03				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kapuas Hulu	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	Kawasan Transmigrasi	0	302.500.000	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kapuas Hulu	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	Kawasan Transmigrasi	1	294.459.100	-
3	32	03	2.01			Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	302.500.000	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kapuas Hulu	Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	294.459.100	-

Kode					Rancangan Awal RKPD						Hasil Analis Kebutuhan						Catatan Penting
					Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi dan Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	302.500.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Provinsi - Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	192.239.800	-
3	32	03	2.01	02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Kawasan Mentebah	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	32	03	2.01	03	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigran Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	32	03	2.01	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kawasan Mentebah	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	32	03	2.01	05	Penyuluhan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	0	-	Pelatihan Transmigrasi	UPT XVI Suka Maju, UPT XVII Kepala Gurung Kecamatan Mentebah	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	20	102.219.300	-
3	32	03	2.01	07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Kawasan Mentebah	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga	0	-	0	0	0	0	0	0	-
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kapuas Hulu	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	%	15,00	786.500.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Kapuas Hulu	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	%	30,00	208.137.000	-
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kapuas Hulu	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian	Satuan Permukiman	1	786.500.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Kapuas Hulu	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian	Satuan Permukiman	6	208.137.000	-
3	32	04	2.01	01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Upt 14 Nanga Aret, Upt 15 Desa Mujan Kec Boyan Tanjung, Upt 16 Suka Maju, Upt 17 Pala Gurung Kec Mentebah, Upt 18 Nanga Kalis Kec Kalis, Upt 19 Keliling Semulung Kec Embaloh Hilir	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga	48	363.000.000	0	0	0	0	0	0	-

Kode						Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
						Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Pagu Indikatif	
3	32	04	2.01	02		Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Upt 14 Nanga Aret, Upt 15 Desa Mujan Kec Boyan Tanjung, Upt 16 Suka Maju, Upt 17 Pala Gurung Kec Mentebah, Upt 18 Nanga Kalis Kec Kalis, Upt 19 Keiling Semulung Kec Embaloh Hilir	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	423.500.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Upt XIV Desa Nangaret, Upt XV Desa Mujan (Kec Boyan Tanjung), Upt XVI Suka Maju, Upt XVII Kepala Gurung (Kec Mentebah), Upt XVIII Nanga Kalis (Kec Kalis), Upt XIX Keiling Semulung Desa Kirin Nangkak (Kec Embaloh Hilir)	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	208.137.000	-

TABEL (T-C. 24)
USULAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besar/Volume	Catatan
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TABEL (T-C. 3.1)
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2.1	Meningkatkan PDRB sektor Industri Pengolahan	2.1.1	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	Persentase Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	%	4,59	4,69	4,78	4,87	4,97	5,07
2.2	Meningkatkan Kesempatan Kerja	2.2.1	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Produktif	%	25,00	9,25	13,40	17,60	19,90	20,80
2.3	Meningkatkan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Warga Transmigrasi	2.3.1	Meningkatnya Pengelolaan SDM Warga Transmigrasi	Persentase Peningkatan Warga Transmigrasi yang Mandiri	%	9,11	10,42	13,02	15,63	18,23	20,83
2.4	Meningkatkan Kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	2.4.1	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	-	25,10	26,10	27,10	28,10	29,10
				Predikat Sakip Perangkat Daerah	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		2.4.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Perangkat Daerah	Score	97,00	95,00	95,50	96,00	96,50	97,00

TABEL (T-C. 3.2)
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				6.007.122.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.908.190.599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				6.007.122.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				6.908.190.599	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61.00	5.508.574.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			62,00	6.334.860.974	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	96.00					97,00			
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terselesaikan	Dokumen	23	90.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			24	104.152.280	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.01	01	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	33.324.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi, Kabupaten/Kota		11	38.322.830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi, Kabupaten/Kota
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	7.485.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	7.485.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	7.485.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	7.485.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.263.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	8.352.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	23.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		8	27.535.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	3.625.189.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	4.168.967.454	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	490	3.383.015.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		564	3.890.467.699	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		12	2.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	213.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		4	245.950.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.369.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	9.624.695	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	30	1.500.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		30	1.725.460	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	30	13.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		30	16.024.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	2.300.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	93.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	107.414.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		6	21.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	21.275.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	56.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dalam Provinsi/Luar Provinsi		2	64.864.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dalam Provinsi/Luar Provinsi
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	753.422.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	866.436.220	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.021.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	34.525.070	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	234.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	269.459.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.229.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	29.013.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	58.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	66.842.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	404	405.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		465	466.595.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terselesaikan	Laporan	12	709.919.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	816.407.506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	2.875.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	90.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		4	104.535.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	616.519.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		1	708.997.506	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terselesaikan	Laporan	12	236.072.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	271.482.915	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	179.893.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		3	206.877.065	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		33	15.525.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	42.679.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		3	49.080.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	Persentase	100.00	250.565.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.00	288.150.210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Klaster Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jenis	2	224.639.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			2	258.335.310	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	32	172.355.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Kabupaten/Kota		35	198.208.480	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi Kabupaten/Kota
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	52.284.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		3	60.126.830	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	Lembaga	1	25.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	29.814.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	4	25.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		4	29.814.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	Persentase	30.00	188.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			32,00	216.980.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	Laporan	12	30.721.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			12	35.329.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	40	30.721.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		40	35.329.725	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang	4	157.957.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4	181.651.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	157.957.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		4	181.651.240	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100.00	59.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			100.00	68.198.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perusahaan	20	59.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			20	68.198.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	35.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		5	41.266.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	23.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu		5	26.931.850	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kabupaten Kapuas Hulu
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				1.082.386.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1.265.558.405	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				666.759.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase	4,00	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			4,25	666.759.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Persentase Pertumbuhan Investasi IKM		3,00					3,25			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	Dokumen	0	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	666.759.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	7	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan (Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Puring Kencana, Jongkong Selimbau, Semitau, (dalam Provinsi/Luar Provinsi)		7	666.759.190	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kecamatan (Embaloh Hulu, Batang Lupar, Badau, Puring Kencana, Jongkong Selimbau, Semitau, (dalam Provinsi/Luar Provinsi)
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				502.596.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				598.799.215	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	Kawasan Transmigrasi	1	294.459.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	338.627.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	294.459.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			1	338.627.965	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

Kode					Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
								Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif	Sumber dana	Lokasi
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	192.239.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi - Pusat		5	221.075.770	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Provinsi - Pusat
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	20	102.219.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT XVI Suka Maju, UPT XVII Kepala Gurung Kecamatan Mentebah		25	117.552.195	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	UPT XVI Suka Maju, UPT XVII Kepala Gurung Kecamatan Mentebah
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	%	30,00	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			30,00	260.171.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian	Satuan Permukiman	6	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			6	260.171.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Upt XIV Desa Nangaret, Upt XV Desa Mujan (Kec Boyan Tanjung), Upt XVI Suka Maju, Upt XVII Kepala Gurung (Kec Mentebah), Upt XVIII Nanga Kalis (Kec Kalis), Upt XIX Keliling Semulung Desa Kirin Nangkak (Kec Embaloh Hilir)		2	260.171.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Upt XIV Desa Nangaret, Upt XV Desa Mujan (Kec Boyan Tanjung), Upt XVI Suka Maju, Upt XVII Kepala Gurung (Kec Mentebah), Upt XVIII Nanga Kalis (Kec Kalis), Upt XIX Keliling Semulung Desa Kirin Nangkak (Kec Embaloh Hilir)

TABEL (T-C. 4.1)
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024

KODE				PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	RENCANA KERJA TAHUN 2024			CATATAN PENTING	
							TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			6.007.122.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.007.122.260	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	61.00	5.508.574.760	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
						Indeks Kepuasan Pelayanan Internal	%	96.00			-
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Dokumen	24	90.567.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	01	Penyusunan, Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	11	33.324.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	6.509.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisai Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	7.263.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	8	23.944.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	3.625.189.090	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	490	3.383.015.390	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	213.870.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	8.369.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggap Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	30	1.500.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	30	13.934.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	1	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	93.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	6	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	07	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	18.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	56.404.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	753.422.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30.021.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	234.313.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.229.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	58.124.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	404	405.735.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	709.919.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	2.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	4	90.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	616.519.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terselesaikan	Laporan	12	236.072.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa, Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	179.893.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	33	13.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	42.679.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Masyarakat/Pencari Kerja/ Pengangguran yang mendapatkan Pelatihan (Fokus Sasaran Usulan Masyarakat)	Persentase	100.00	250.565.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Kluster Pelatihan Berbasis Kompetensi	Jenis	2	224.639.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	32	172.355.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	3	52.284.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang terakreditasi	Lembaga	1	25.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	4	25.926.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja yang difasilitasi	Persentase	30.00	188.679.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	04	2.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan Antar Kerja di daerah Kab/Kota	Laporan	12	30.721.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	04	2.01	02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	40	30.721.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi	Orang	4	157.957.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	07	04	2.04	01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	4	157.957.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	%	100,00	59.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perusahaan yang mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Perusahaan	20	59.303.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	5	35.884.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Perkara	5	23.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3					URUSAN PEMERINTAH PILIHAN				1.082.386.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Pengolahan	Persentase	4,00	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
						Persentase Pertumbuhan Investasi IKM		3,00			
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPIK yang diperdakan	Dokumen	0	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	31	02	2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen	7	579.790.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				502.596.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Terbangun	Kawasan Transmigrasi	1	294.459.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persebaran Penduduk di Permukiman Transmigrasi pada Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	294.459.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	192.239.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	03	2.01	06	Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang	20	102.219.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi yang dikembangkan/Bina	%	30,00	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman yang dikembangkan pada tahap Kemandirian	Satuan Permukiman	6	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
3	32	04	2.01	02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman	2	208.137.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-
Jumlah Rencana Kerja Tahun 2024									7.089.508.960	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-

